

PERANAN AGROINDUSTRI DALAM PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA KRISIS EKONOMI

Lia Amalia
Dosen Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta
lia_amal2003@yahoo.com

Abstrak

Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan depresiasi mata uang rupiah dan apresiasi mata uang US dolar, ini disebabkan karena industrialisasi substitusi impor yang mengandalkan proteksi ternyata lebih banyak menggunakan kandungan impor (*import content*). Agroindustri merupakan salah satu yang berperan dalam pemulihan perekonomian Indonesia pasca krisis, karena ternyata agroindustri tidak memerlukan kandungan impor yang tinggi dan lebih banyak menggunakan kandungan lokal (*local content*) melalui Usaha Kecil Menengah (UKM). Secara empiris terbukti bahwa ketika masa krisis ekonomi tahun 1997 seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif ternyata sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berbasis sumberdaya domestik justru tumbuh positif. Globalisasi yang melanda ekonomi dunia sehingga tidak ada batas antar negara menuntut keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari masing-masing produk yang dihasilkan suatu negara, agroindustri yang disertai spesialisasi dibidang pertanian dengan memanfaatkan *comparative advantage* serta pemberdayaan sumberdaya domestik diharapkan dapat mendorong ekspor Indonesia.

Kata Kunci: Globalisasi, *Import content*, *local content*, Usaha Kecil Menengah (UKM), *comparative advantage*, *competitive advantage*, agroindustri

Pendahuluan

Melihat kondisi negara yang menghadapi lilitan hutang luar negeri, kolapsnya industri manufaktur (karena bertumpu pada komponen impor), serta bukti empiris lainnya yang ditunjukkan kinerja ekonomi pasca krisis, semakin diyakini bahwa ekonomi yang berbasis sumber daya domestik dapat dijadikan penyelamat.

Yang dimaksud sumberdaya domestik adalah sektor-sektor yang justru pada masa lalu kurang mendapat perhatian pemerintah, yang mencakup pertanian dalam arti luas pangan, hortikultura, kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kerajinan

rakyat, pariwisata dan lain-lain yang umumnya berskala Usaha Kecil Menengah (UKM).

Secara empiris telah terbukti bahwa ketika pada masa krisis ekonomi 1997 seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, ternyata sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berbasis sumber daya domestik justru tumbuh positif. Agar sektor ekonomi yang berbasis sumber daya domestik dapat memberikan sumbangan yang maksimum terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, hendaknya dilakukan serangkaian langkah yang kompatibel dengan semangat globalisasi dan otonomi daerah. Semangat globalisasi

dapat terwujud melalui terbukanya partisipasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang bisa masuk mendorong tumbuhnya sektor ekonomi yang berbasis sumber daya domestik dengan mempertimbangkan prinsip *comparative advantage* dan keunggulan daya saing yang dimiliki masing-masing daerah.

Keterlibatan Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut tetap dengan beberapa catatan yakni mesti terjadi difusi modal, manajemen, keterampilan, terutama *transfer of technology* tepat guna sehingga produk agro industri yang dikembangkan masing-masing daerah dapat diekspor dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi.

Program pemulihan ekonomi yang sudah dilaksanakan pemerintah terdahulu sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, telah dilakukan secara berkesinambungan. Hasilnya diukur dengan berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi dan penciptaan kesempatan kerja. Sasaran – sasaran kebijakan ekonomi yang mencakup stabilitas ekonomi yang optimal dan berimbang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang berbasis sumber daya domestik (ESDD) belum menjadi pilihan kebijakan pemerintah pasca krisis ekonomi tahun 1997.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Peranan Agro Industri dalam Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi”

Tinjauan Teori

Indikator pertumbuhan perekonomian yang dapat dijadikan penentu atau fakta pertumbuhan perekonomian di suatu negara biasanya merupakan suatu acuan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, secara global atau garis besar biasanya dapat dilihat dari beberapa faktor penentu yaitu: (1) Investasi, (2) Kondisi perbankan,

(3) Sektor riil, (4) Angka Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebangkitan industri perbankan sangat penting bagi laju pertumbuhan perekonomian suatu negara hal tersebut selalu berkaitan erat. Peningkatan industri perbankan dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu (1) Likuiditas, (2) Solvabilitas, (3) Pendapatan bunga obligasi rekapitalisasi. Suatu perkembangan sektor riil dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang sangat terlihat meningkat drastis yaitu perindustrian yang berbasis sumber daya alam baik itu yang *renewable* maupun yang tidak, misalnya seperti industri otomotif, ekspor migas dan non migas, pertambangan dan perkebunan.

Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian karena peningkatan sektor riil jelas mempengaruhi pada kas negara. Peningkatan persentase angka PDB (produk domestik bruto) mempengaruhi asumsi dalam perhitungan APBN, karena dengan meningkatkan konsumsinya untuk keperluan rumah tangga negara, sehingga tidak menutup kemungkinan percepatan peningkatan perekonomian dapat terjadi secara bertahap.

Kuznets (Sadono Sukirno, 2006) menganalisis perubahan peranan berbagai subsektor industri, berbagai jenis industri dalam sub-sektor industri pengolahan dan sektor jasa dalam menciptakan produksi nasional maupun dalam menyediakan kesempatan kerja.

Chenery, (Sadono Sukirno, 2006) mengemukakan 3 faktor yang menyebabkan perbedaan di antara lajunya perkembangan industri-industri pengolahan dan perkembangan tingkat pendapatan perkapita: (1) sebagai akibat adanya substitusi impor, (2) adanya perkembangan permintaan untuk barang-barang jadi (*final goods*), dan (3) adanya kenaikan dalam permintaan barang-barang setengah jadi (*intermediate goods*). Menurut analisis Chenery usaha untuk mengadakan substitusi impor

merupakan faktor terpenting yang menyebabkan industrialisasi tumbuh pesat, karena faktor ini mengakibatkan 50 persen dari pertumbuhan yang tidak sebanding terjadi. Pengaruh perkembangan pendapatan terhadap pertumbuhan permintaan hasil-hasil industri mengakibatkan 22 persen dari industrialisasi yang terjadi. Faktor-faktor lainnya seperti perubahan harga, kesalahan dalam penaksiran, adanya substitusi di antara berbagai barang lain dengan hasil industri, dan adanya substitusi di antara berbagai barang lain dengan hasil industri (misalnya tenaga manusia digantikan dengan obat kimia untuk membasmi lalang dan berbagai penggantian lainnya yang semacam itu) merupakan faktor-faktor yang menimbulkan 18 persen industrialisasi.

Chenery mengambil kesimpulan bahwa faktor terpenting yang menimbulkan industrialisasi adalah karena adanya substitusi impor, dan bukan karena perubahan dalam komposisi permintaan sebagai akibat dari pendapatan yang bertambah.

Raanan Weitz (2003) menyatakan bagi sejumlah besar keluarga pertanian, yang para anggotanya merupakan tenaga kerja pokok, pertanian bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan atau sumber pendapatan, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan gaya hidup. Kenyataan ini mudah dilihat, terutama pada masyarakat-masyarakat tradisional, di mana para petani sepanjang hari mengabdikan diri menggarap lahannya dengan dedikasi penuh. Setiap perubahan metode produksi dengan sendirinya akan membawa perubahan-perubahan terhadap pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, agar bisa membuahkan hasil yang diharapkan, setiap pengenalan inovasi biologi dan teknologi pertanian bukan hanya harus di adaptasikan kepada keadaan alam dan ekonomi saja, tetapi juga kepada sikap, nilai-nilai, dan tingkat kemampuan para petani itu sendiri sehingga mereka mau

dan mampu memahami, menerima serta melaksanakan perubahan-perubahan metode produksi yang lebih baik, sesuai dengan yang dianjurkan.

Gunnar Myrdal (Todaro, 2003) mengidentifikasi tiga elemen atau kekuatan pokok yang saling berkaitan yang membentuk pola kepemilikan lahan tradisional di Asia, sebagai berikut: (1) penindasan yang dilakukan oleh bangsa Eropa; (2) pengenalan transaksi ekonomi yang serba menggunakan uang (monetisasi) secara besar-besaran serta meningkatnya kekuatan pemilik uang yang bertindak sebagai rentenir ; dan (3) laju pertumbuhan penduduk Asia yang sangat cepat.

Negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman di negara - negara industri maju tentang peranan dan sumbangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pertumbuhan ekonomi.

Anderson, (2002) menyimpulkan dan mengkaji ulang sejarah perekonomian di beberapa negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat; (1) setidaknya-tidaknya perkembangan usaha skala kecil di Jepang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat cepat; (2) sumbangan UKM dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II tidak bisa diabaikan.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut: (a) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk, (b) hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil, (c) kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja, (d) fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis,

(e) terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan

Ada empat aspek yang dapat dipergunakan dalam konsep usaha kecil menengah yaitu; (1) kepemilikan, (2) operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal, (3) wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitarnya, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya, (4) ukuran dari perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama.

Dari hasil penelitian Balton, (1971) menyatakan bahwa pimpinan/pengurus perusahaan skala kecil menengah pada umumnya kurang atau tidak mengenyam pendidikan formal atau mempunyai pendapat yang lemah terhadap perlunya pendidikan dan pelatihan.

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah: (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), (2) memiliki hasil paling banyak Rp 1 Milyar/tahun

Untuk kriteria usaha menengah: (1) untuk sektor industri, memiliki total aset paling banyak Rp. 5 Milyar, (2) untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 Milyar.

INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai maksimal Rp. 10 Milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Peranan Agro Industri dalam Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi

Wacana baru yang berkembang pasca Orba adalah perlunya pengembangan agro industri bersamaan dengan

restrukturisasi ekonomi pedesaan. Wacana baru ini tampaknya ingin menjawab kritik terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian dalam strategi pembangunan Orba yang terlalu memberikan prioritas kepada program swasembada beras semata, seiring dengan sangat menekankan sektor industri dengan strategi Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) yang menganalkan proteksi.

Sejalan dengan isu globalisasi perekonomian dan kebutuhan akan promosi ekspor yang berorientasi ke pasar dunia (*outward looking*) yang sangat menuntut efisiensi yang tinggi di segala bidang, maka sektor pertanian dengan semua subsektornya memperoleh peluang yang sama besarnya untuk *go internasional* bersama industri manufaktur, dan lain-lainnya. Terutama pertanian yang *internationally marketable*.

Dengan demikian, strategi pembangunan agrobisnis menjadi sangat relevan untuk menjawabnya. Pendekatan agroindustri ini akan membawa implikasi yang sangat jauh, tidak saja pada pengembangan usaha-usaha agro industri itu sendiri, akan tetapi juga pada pembaharuan yang diperlukan dalam kelembagaan pertanian/ pedesaan, reformasi peran pemerintah, dan keterpaduan administrasi pembangunan. Pelaku utama sistem agro industri adalah dunia usaha, petani/nelayan, dan badan-badan usaha, seperti koperasi, BUMN, dan perusahaan swasta. Pemerintah seyogyanya lebih berfungsi sebagai pembimbing, pengarah, pembina, dan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dalam mengembangkan usaha-usaha agro bisnis, perlu diberikan perhatian khusus kepada aspek-aspek pengembangan kawasan yang sesuai dengan agro ekosistem dan peluang pasar, skala usaha, dan keterkaitan secara terpadu antar subsistem dari sistem agro industri. Sistem agro industri itu sendiri terdiri dari empat

komponen kegiatan utama. Yakni (1) penyediaan sarana produksi; (2) proses produksi/menghasilkan produk pertanian; (3) pengolahan hasil (agro industri) dan (4) pemasaran hasil. Keempat komponen kegiatan tersebut haruslah saling berhubungan dan saling berkait erat, serta didukung oleh industri-industri (industri rumah tangga, tradisional, semi modern, hingga industri modern) dan jasa-jasa penunjang di dalam kerangka transformasi ekonomi pertanian/pedesaan.

Kegiatan dalam penyediaan sarana produksi akan sangat banyak tergantung kepada sifat kegiatan produksinya. Apakah ia bersifat tradisional, semi modern, atau modern. Dengan demikian besarnya kapital yang diperlukan untuk kegiatan penyediaan sarana tersebut umumnya berkorelasi positif dengan sifat kegiatan produksi tersebut. Sementara tingkat efisiensi dari proses produksi tidak selalu berkorelasi positif dengan sifat tradisional, semi modern, atau modernnya kegiatan produksi tersebut. Tak jarang petani/nelayan tradisional lebih efisien dibanding yang semi modern atau yang modern. Ini karena mereka bertanggung jawab dalam beberapa hal, seperti kondisi sumber daya alam, dan sumber daya manusia, ketetapan penggunaan teknologi dan jenis manajemen, kebijakan pemerintah, dan dukungan faktor luar lainnya.

Kegiatan pengolahan hasil (agro industri) umumnya akan banyak tergantung kepada tingkat penguasaan teknologi pengolahan, baik dalam *handling* melalui penyediaan sarana gudang berpendingin (*cold storage*) dan kedekatan kepada pasar menjadi sangat penting karena umumnya komoditas pertanian yang sangat mudah rusak dan proses penciptaan nilai tambah (*added value process*), dan sebagainya.

Selain itu, yang lebih menentukan juga adalah bahwa kegiatan agro-industri yang ideal haruslah berorientasi

kepada potensial *demand/market*. Dengan demikian, dalam era kompetisi global yang keras dewasa ini harus dihindari prinsip *supply creates its own demand* atau orientasi yang sekedar mengejar target produksi (*production approach*). Kegiatan pemasaran (*marketing*) adalah suatu ujung yang sangat penting, bukan hanya agar produsen bertindak efisien dalam proses produksinya, tapi haruslah juga mempunyai kemampuan yang *highly profit making*. Dan hal inilah umumnya kelemahan produsen dari produk pertanian. Dari segi internal, ia akan sangat tergantung kepada tingkat kemampuan *market/business intelegent* dari produsen. Yakni kemampuan mencari peluang pasar untuk segmen, daerah, negara, hingga benua mana yang dapat ditembus.

Jika secara sederhana sasaran pengembangan agro industri ke depan dirumuskan menjadi dua sasaran besar: swa sembada beras, kedele, jagung, hortikultura, perikanan, dan sebagainya dan penguasaan pasar ekspor berdasarkan komoditas unggulan, maka strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pun haruslah di *set up* kepada dua sasaran besar tersebut dengan catatan diupayakan tidak semata dirumuskan strategi pengembangan SDM internal agro industri tersebut.

Dengan demikian berarti, bahwa dalam strategi pembangunan dengan format baru secara makro haruslah dilakukan reorientasi agar terdapat fokus yang kuat untuk merealisasikan secara konkret desentralisasi, otonomi daerah, penyebaran pembangunan keluar Jabodetabek, luar Jawa, Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan pedesaan – baik yang bersifat *on farm* (mengintensifkan pembangunan pertanian yang berorientasi agro industri) maupun *off farm* (agroindustrialisasi maupun industrialisasi tepat guna non pertanian) di kawasan-kawasan baru tersebut. Hal ini berarti perlu dikurangnya sentralisme pembangunan yang terlalu memusatkan

kegiatannya di kawasan Jabodetabek, Jawa, KBI, dan perkotaan seperti selama ini. Dari strategi pengembangan SDM untuk mencapai swasembada plus, karena sifat orientasi kegiatan para pelakunya yaitu dunia usaha, petani, nelayan, badan-badan usaha koperasi dan BUMN termasuk kalangan birokrat yang terlibat didalamnya hendaknya dapat mengkombinasikan dua pendekatan.

Disatu pihak sifat "probisnis" yang penekanannya kuat kepada efisiensi, produktivitas, dan daya saing yang tinggi yang menggunakan signal-signal pasar menjadi gerakan besar-besaran. Di lain pihak dilakukan juga prinsip-prinsip pelaksanaan strategi Orba yang sukses berhubung rendahnya kualitas SDM yakni dalam hal pendekatan terhadap petani/nelayan yang bersifat kelompok beserta pentingnya peranan para pendamping/penyuluh, para pemimpin informal dan Koperasi Unit Desa (KUD). Tapi ini dilakukan dengan catatan bahwa mereka membawa visi baru yang bersifat probisnis tersebut.

Inisiatif, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan baik secara individual maupun badan usaha harus ditekankan agar pencapaian swasembada tersebut bukan hanya dalam rangka kerangka strategi pencapaian stabilitas. Dalam saat yang sama, terdapat ruang agar para pelakunya dapat menikmati kesejahteraan lebih tinggi dengan terbukanya peluang harga dan pasar yang lebih luas (termasuk perdagangan antar daerah, antar pulau, maupun pasar ekspor).

Sementara itu, untuk strategi pengembangan SDM agroindustri yang bergerak berdasarkan komoditas unggulan untuk merebut pasar ekspor akan membutuhkan bukan hanya pelaku (petani/nelayan, badan-badan usaha, swasta, BUMN, koperasi) yang disiapkan memiliki kapasitas daya saing global.

Tapi juga akan memerlukan juga mobilisasi semua elemen *Indonesia*

Incorporated (birokrasi, peneliti, diplomat ekonomi dan perdagangan di seluruh perwakilan Indonesia di seluruh dunia) dengan visi yang terbaru (*reinventing government and economic actors*) untuk bersama-sama membangun aktivitas agribisnis dan agroindustri, serta industrialisasi tepat guna lainnya yang menopang bangkitnya Usaha Menengah dan Kecil (UKM) pasca krisis ini.

Dari sini pula kita melihat betapa strategisnya UU Antimonopoli dan UU Persaingan Sehat agar pelbagai hambatan struktural dalam pengembangan bisnis kalangan UKM tercegah secara sistematis. Ini terutama dalam rangka melakukan mobilitas vertikal maupun horisontal kalangan UKM dalam usahanya yang selama ini menghadapi tembok monopoli/oligopoli oleh kalangan usaha besar dan konglomerat yang hanya sekedar melakukan "perburuan rente". Dapat kita bayangkan, untuk semua itu kita memerlukan pelbagai reformasi ekonomi dan politik yang sesegera mungkin

Kesimpulan

1. Krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia awalnya disebabkan oleh krisis moneter dimana kurs mata uang rupiah mengalami depresiasi sedangkan mata uang US\$ mengalami apresiasi, ini disebabkan karena industrialisasi substitusi impor (ISI) yang mengandalkan proteksi lebih banyak menggunakan kandungan impor (*import content*).
2. Melalui agroindustri yang menghasilkan komoditas unggulan berupa swasembada pangan tidak hanya beras tetapi komoditas pertanian yang lain seperti kedele, jagung, hortikultura, perikanan, kelautan yang lebih banyak memakai kandungan lokal (*local content*) ternyata dapat menjadi produk unggulan

- sehingga menjadi produk ekspor andalan.
3. Peranan agroindustri memberikan aspek yang positif dalam pemulihan perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi dengan pendekatan pemberdayaan sumber daya domestik (ESDD) melalui Usaha Kecil Menengah (UKM).

Saran

1. Perlu meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, kebijakan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi prioritas dengan menempuh jalan meningkatkan peran Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum dan perbankan Syariah.
2. Untuk menghasilkan produk unggulan dalam komoditas pertanian dalam agroindustri diperlukan strategi pengembangan dan peningkatan sumber daya domestik, sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi pengolahan, penyediaan sarana gudang berpendingin (*cold storage*) karena umumnya komoditas pertanian sangat mudah rusak.
3. Perlu meningkatkan jiwa dan semangat kewirausahaan dalam agroindustri menuju Usaha Kecil Menengah (UKM) menghasilkan inovasi dalam teknologi pengembangan produk, hubungan kemanusiaan yang akrab, penciptaan kesempatan kerja, fleksibel dan dinamis

Daftar Pustaka

Didin S. Damanhuri, "Korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia", Lembaga Penerbit - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Sadono Sukirno, "Ekonomi Pembangunan : Masalah, dan dasar Kebijakan", Edisi Kedua, Cetakan Ke 1, Kencana, Jakarta, 2006.

Todaro, Smith, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", Alih bahasa Drs. Haris Munandar, M.A, Puji A.L., S.E. Edisi kedelapan, Jakarta, 2003.

Tiktik Sartika Partomo, Abd Rachman Soejoedono, "Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

www. bi.go.id, "Perkembangan Ekonomi Indonesia 2005, Jakarta, 2005.